

ANALISIS KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI ACEH SINGKIL

Mallia Hartani

Departemen Sosiologi FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: mallia.hartani95@gmail.com

Soni Akhmad Nulhaqim

Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: soni.nulhaqim@unpad.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia konflik antar umat beragama masih sering terjadi, salah satu yang sering menjadi permasalahan adalah hal yang berkaitan dengan izin pendirian rumah ibadah. Meskipun telah ditetapkannya UU tentang pendirian rumah ibadah tetapi hal ini masih menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Di Aceh izin mendirikan rumah ibadah tidak semudah di tempat-tempat lain di Indonesia. Oleh sebab itu, terjadi konflik antar agama di Aceh Singkil terkait izin pendirian rumah ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi terjadinya konflik dan hubungan umat beragama di Aceh Singkil. Metode yang digunakan metode penelitian library research. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konflik yang terjadi di Aceh Singkil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Aceh Singkil terjadi kekecewaan umat islam atas umat Kristen karena melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Kata Kunci: UU, Konflik, Agama, Aceh Singkil

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk dilihat dari banyaknya perbedaan yang dimiliki seperti keberagaman bahasa, etnis, suku bangsa dan keyakinan beragama. Hal ini merupakan modal kekayaan yang dimiliki Indonesia. Namun di samping itu kemajemukan atau keanekaragaman juga dapat mengandung kerawanan-kerawanan yang dapat memunculkan kepentingan antar kelompok yang berbeda-beda tersebut sehingga menimbulkan perpecahan. Rahardjo (2005:1) dalam Christiany Juditha (2016) mengatakan bahwa pluralitas kultural seringkali dijadikan alat untuk memicu munculnya konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Meski jika diperhatikan lebih mendalam sebenarnya faktor-faktor penyebab dari pertikaian tersebut kebanyakan berawal dari persoalan-persoalan ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial dan politik.

Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu masalah yang sering mengusik kerukunan antarumat beragama adalah masalah terkait pendirian rumah ibadah.

Hal ini terjadi karena perbedaan tipis antara hak beribadah dengan mendirikan rumah ibadah, sehingga tidak jarang sekelompok penganut agama menganggap sama, bahwa mendirikan rumah ibadah juga sebagai hak pribadi yang tidak bisa dikurangi. Padahal urusan mendirikan rumah ibadah berada di luar hak pribadi, karena sudah berada di ranah sosial. Pendirian rumah ibadah di suatu tempat atau lingkungan sosial yang kurang tepat dapat mengundang rasa tidak nyaman atau gangguan dari pihak lain. Rasa tidak nyaman yang berlarut-larut sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006 dan di Aceh telah diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007. Namun hal ini masih menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat, bagi kalangan yang mendukung beranggapan bahwa adanya peraturan ini merupakan langkah konkrit sebagai jawaban dari keistimewaan Aceh dalam bidang pelaksanaan syariat

Islam sebagai agama mayoritas di Aceh. Sebaliknya, bagi golongan yang kontra menganggap bahwa peraturan ini mempersempit peluang minoritas dalam mendirikan rumah ibadah di Aceh.

Meskipun telah dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang pendirian rumah ibadah, namun hingga saat ini proses pendirian rumah ibadah masih sering menyebabkan konflik. Izin pendirian rumah ibadah menjadikan sebagian kalangan minoritas kesulitan mendapatkan akses beribadah dengan aman dan nyaman. Seperti halnya di Aceh Singkil, terjadi konflik antar agama yaitu pembakaran gereja oleh massa karena dianggap tidak memiliki izin.

Dengan menggunakan teori konflik Simon Fisher dan Dekha Ibrahim Abdi dkk dan berdasarkan hasil penelusuran literature atau wacana tulisan ini ingin menguraikan analisis konflik antar agama di Aceh Singkil. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tulisan ini yaitu “Apa pemicu terjadinya konflik antar umat beragama di Aceh Singkil dan bagaimana hubungan antar umat beragama di Aceh Singkil?”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, berita dan dokumen). Penelitian sebagai landasan mendasar bagi peneliti untuk merumuskan realitas permasalahan, artikel-artikel virtual, studi literature dan data validitas yang jelas keberadaannya. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengabstraksi beberapa

hasil temuan yang dikelompokkan dengan dibantu menggunakan teknik analisa pemetaan konflik dari Simon Fisher dkk.

PEMBAHASAN

Profil singkat Aceh Singkil

Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten terjauh dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Letak wilayah kabupaten ini berada di dekat garis perbatasan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya wilayah bagian selatan Kabupaten Aceh Singkil berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Dairi, Sumatera Utara (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2014). Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Aceh Singkil lebih banyak berhubungan dengan masyarakat/pasar di Sumut dari pada masyarakat/pasar di Aceh.

Kabupaten Aceh Singkil merupakan satu-satunya daerah tertinggal dan termiskin di Provinsi Aceh yang ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Sekalipun Singkil tertinggal tetapi memiliki potensi pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit (Lubis, 13 Desember 2016). Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Aceh Singkil sangat menarik bagi para pendatang, khususnya dari daerah perbatasan di bagian selatan, terutama dari Pakpak Barat, Dairi dan Tapanuli Tengah. Penduduk Aceh Singkil berjumlah 102.302 jiwa. Berdasarkan agama yang dianut, mereka terdiri dari penganut agama Islam 90.508 jiwa (88,47%), penganut Kristen 10.715 jiwa (10,47%), Katolik 816 jiwa (0,79%), lain-lain 260 jiwa (0,25%) (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2014).

Hubungan Antar Umat Beragama di Aceh Singkil

Pada awal kedatangan agama Kristen, hubungan antara umat Islam dan Kristen cukup baik dan harmonis. Hal itu

tercermin antara lain pada waktu pembangunan gereja pertama di Kuta Kerangan dan gereja-gereja lain yang dulu terbuat dari kayu, gereja-gereja tersebut merupakan hasil karya seorang haji yang ahli pertukangan. Selain itu, dari Lipat Kajang, desa terdekat yang berpenduduk Muslim, dengan Kuta Kerangan tempat pemukiman orang-orang Kristen, ada seorang raja, yaitu Raja Dayo. Sang Raja setiap tahun baru selalu mengunjungi gereja dan menyampaikan salam kepada orang-orang Kristen agar hidup rukun dan kerja keras.

Kearifan lokal yang di Aceh Singkil seperti perkawinan menjadikan adanya crosslink antar marga dan agama, yang mana crosslink antar marga dan agama itu menjadi modal sosial untuk menjembatani umat islam dan Kristen. Hal tersebut menjadikan hubungan antara umat Islam dan Kristen di Kabupaten Singkil sejak zaman awal kedatangan Kristen hingga sekarang pada dasarnya cukup baik. Al Fairusy mengatakan bahwa ikatan clan dan identitas sesama "Orang Singkil" berfungsi untuk merajut kesadaran dan keberlangsungan aktivitas sosial dalam bingkai damai, sebagaimana ungkapan yang berkembang di masyarakat, "Kami berdamai karena klan dan marga kami" (Al Fairusy, 2015:43).

Binsar (2017) mengatakan bahwa hubungan umat beragama di Aceh Singkil sangat harmonis. Masyarakat saling mengharga dan menghormati antar kedua pemeluk agama Islam dan Kristen, masyarakat juga telah mewujudkan kehidupan beragama yang tertib, aman dan rukun. Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk menghindari sikap egois, iri, dengki dan sikap yang membawa pengaruh negatif bagi kelangsungan umat beragama di tempat tersebut. Di beberapa waktu pernah terjadi konflik terkait agama, namun konflik tersebut sudah selesai dan masyarakat kembali hidup rukun bahkan penduduk di sini saling menjaga dan mentaati aturan yang ditetapkan oleh kepala desa.

Jejak Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil

Masuknya penganut Kristen di Aceh Singkil diawali oleh usaha kolonial Belanda mendatangkan sekitar 100 kepala keluarga non muslim pada tahun 1933 untuk melatih masyarakat setempat kegiatan pertanian dan bercocok tanam lainnya. Meski dianggap sinis oleh masyarakat karena mereka menganggap pekerjaan tersebut sudah turun temurun dilakukan dan mereka merasa tidak ada permasalahan yang terjadi terkait keahlian dalam pertanian masyarakat di Aceh Singkil tersebut.

Konflik Aceh Singkil bermula pada tahun 1979, yaitu adanya rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) dan isu kristenisasi di Aceh Singkil. Menurut Andi Tambunan dalam (Muhammad Sahlan 2016), pada tahun 1979 seorang penginjil dari Gereja Tuhan Indonesia (GTI) Sumatera Utara datang untuk mendirikan gereja di Gunung Meriah. Kejadian ini memicu protes dari umat muslim di Aceh Singkil sehingga terjadi pertikaian antar umat muslim dan umat kristiani. Konflik tersebut diselesaikan secara musyawarah yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat penandatanganan perundingan oleh delapan ulama dan delapan pengurus gereja dan diakhiri dengan diadakannya Ikrar Kerukunan Bersama pada tanggal 13 Oktober 1979.

Pada tahun 1995 terjadi pembakaran di gereja GKPPD tetapi berkat bantuan warga gereja diselamatkan, kemudian pada tahun 1998 gereja kembali dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Pada tahun 2001 terjadi gejolak lagi karena umat Kristen memknta pendirian tambahan padahal umat islam telah memberikan toleransi untuk mendirikan tempat ibadah sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Pembakaran gereja kembali terjadi pada tahun 2006 karena warga tidak setuju rumah dijadikan tempat ibadah.

Pada 30 April 2012 kembali muncul riak-riak konflik yaitu adanya aksi

demonstrasi oleh umat muslim yang memaksa pemerintah untuk menertibkan pembangunan rumah ibadah gereja karena maraknya pembangunan ilegal di tujuh kecamatan di Aceh Singkil. Sebanyak 27 gereja tersebar di tujuh kecamatan tersebut. Saat itu berdasarkan keputusan pemerintah, izin pendirian gereja hanya dikeluarkan untuk lima unit yang terletak di kecamatan Simpang Kanan, Suro, Danau Paris, dan Gunung Meriah. Sehingga gereja-gereja selain ditempat yang telah ditentukan diperintahkan untuk dibongkar.

Pada Juni 2012, kondisi di Aceh Singkil kembali memanas karena beredarnya buku tanpa penerbit yang dianggap menghina Islam. Umat Islam yang mempersoalkan permasalahan tersebut malah dianggap memperkeruh toleransi dalam kehidupan umat beragama di Aceh Singkil. Hal tersebut terus memendang dan memunculkan kembali konflik baru pada tahun 2015.

Pada 13 Oktober 2015 kondisi umat beragama di Aceh Singkil memanas sehingga terjadi lagi konflik dengan membakar satu unit gereja di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah. Kejadian ini dipicu oleh ketidakpuasan umat muslim terhadap penjadwalan pembongkaran gereja oleh pemerintah kabupaten yang rencananya dilakukan pecan depan. Akibat kejadian ini banyak korban yang mengungsi ke Sumatera Utara. Dalam surat kabar juga memberitakan kondisi mencekam di Aceh Singkil terjadi hingga tengah malam bahkan salah satu wartawan menjadi sasaran amukan massa.

Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil

Untuk memahami latar belakang dan sejarah suatu situasi, memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang, mengidentifikasi kelompok yang terlibat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari terjadinya konflik perlu dilakukan analisis. Tulisan ini

menggunakan salah satu alat bantu analisis yang dikemukakan oleh Simon Fisher dan Dekha Ibrahim Abdi dkk, adapun alat bantu analisis yang di pakai yaitu alat bantu analisis penahapan konflik. Alat bantu ini berupaya menunjukkan peningkatan dan penurunan intensitas konflik yang digambar dalam skala waktu tertentu. Alat bantu analisis ini bertujuan ini untuk melihat thapa-tahap dan siklus peningkatan dan penuruanan konflik, membahas ditahap mana situasi yang terjadi sekarang dan berusaha meramal pola-pola intensitas konflik dimasa depan dengan tujuan untuk menghindari pola-pola tersebut terjadi.

Analisis ini terdiri dari lima tahap. Adapun tahap-tahap analisis ini adalah:

PRAKONFLIK: Tahap ini merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian anatar dua pihak atau lebih sehingga menimbulkan konflik. Dilihat dari konflik agama di Aceh Singkil, awal konflik ini terjadi karena maraknya pendirian rumah ibadah gereja yang tidak sesuai dengan keputusan pemerintah yaitu izin pendirian gereja hanya dikeluarkan untuk lima unit yang terletak di kecamatan Simpang Kanan, Suro, Danau Paris, dan Gunung Meriah. Kemudian beredarnya buku tanpa penerbit yang dianggap menghina agama Islam.

KONFRONTASI: Pada tahap ini konflik semakin terbuka, dimana terjadi aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Pada konflik agama di Aceh Singkil terjadi aksi demonstrasi oleh umat muslim yang memaksa pemerintah untuk menertibkan pembangunan rumah ibadah gereja karena maraknya pembangunan ilegal di tujuh kecamatan di Aceh Singkil. Sebanyak 27 gereja tersebar di tujuh kecamatan tersebut.

KRISIS: Tahap ini merupakan pucak konflik terjadinya ketegangan dan kekerasan antar pihak. Pada konflik agama di Aceh Singkil terjadi pembakaran gereja yang terjadi mulai tahun 1995- 2015 karena masalah izin pendirian rumah ibadah.

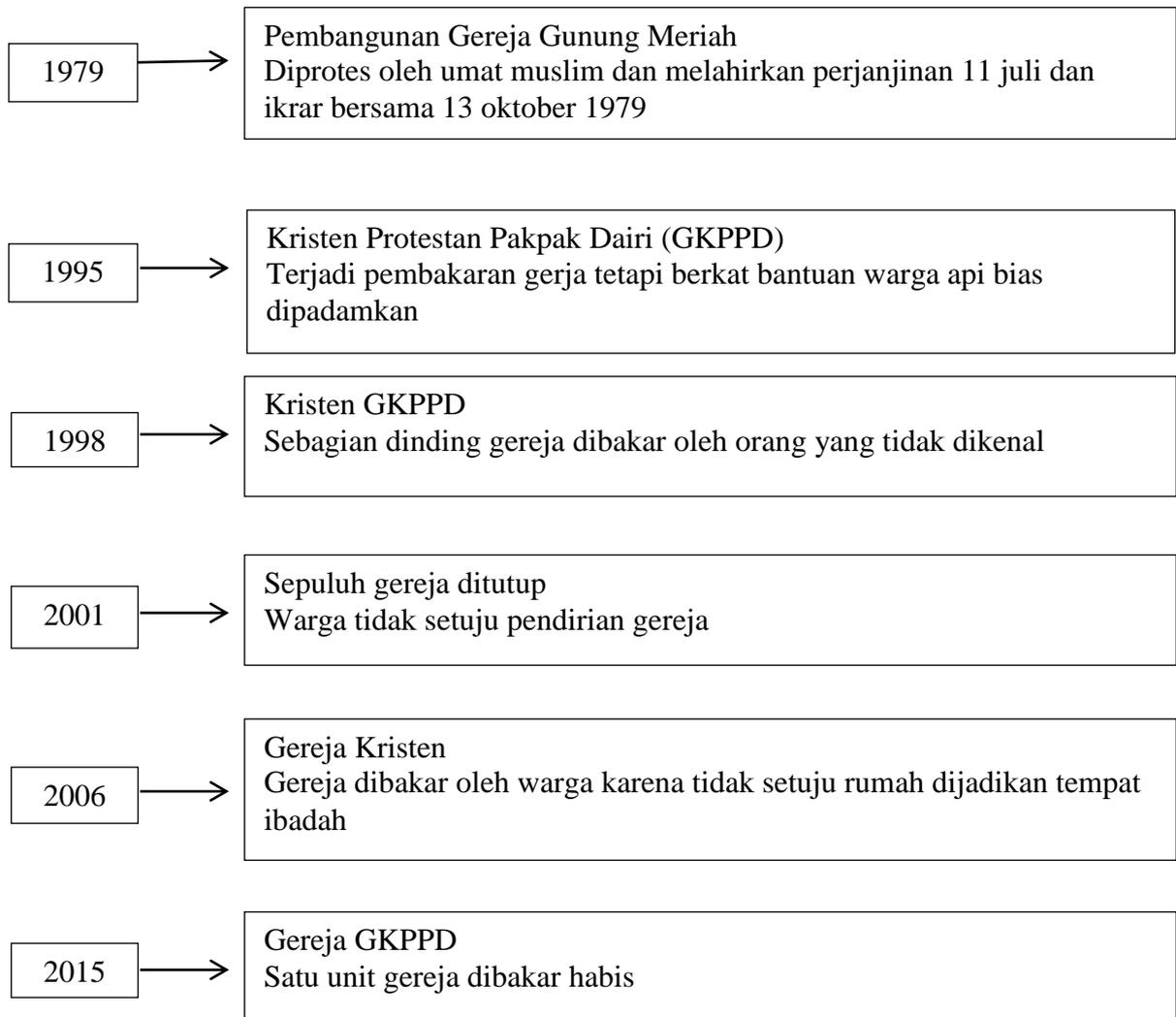
AKIBAT: Tahap ini merupakan tahap yang terjadi akibat tahap krisis yaitu setiap krisis selalu menimbulkan akibat. Akibat dari konflik agama di Aceh Singkil korban harus mengungsi ke Sumatera Utara dan dalam surat kabar juga memberitakan kondisi mencekam di Aceh Singkil terjadi hingga tengah malam bahkan salah satu wartawan menjadi sasaran amukan massa.

PASCAKONFLIK: Tahap ini adalah tahap akhir yang mana situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang hubungan antar dua pihak mengarah ke arah yang lebih normal. Namun jika isu-isu dan masalah yang timbul saling bertentangan, tahap ini sering kembali menjadi ke situasi prakonflik. Dilihat di konflik Aceh

Singkil, hubungan kedua belah pihak mulai normal. Walaupun sering terjadi konflik agama di Aceh Singkil hubungan masyarakat selalu harmonis. Hubungan masyarakat memanas ketika konflik sedang berlangsung saja. Tetapi permasalahan tentang izin pendirian rumah ibadah selesai hingga saat ini. Hal ini ditakutkan memicu kembali kembalinya konflik karena masih adanya dendam dan sebagainya. Yang mana hal ini kembali terjadi ke situasi prakonflik.

Adapun alat bantu analisis lain yang di pakai yaitu alat bantu analisis urutan kejadian. Alat bantu ini berupa grafik yang menunjukkan kejadian-kejadian yang telah ditempatkan menurut waktu. Alat bantu ini digunakan agar dapat lebih memahami konflik yang terjadi.

Urutan kejadian



Dengan melihat beberapa literature tentang hubungan antar umat beragama di Aceh Singkil dan melihat analisis menggunakan alat analisis urutan kejadian diatas, konflik ini sering terjadi karena rasa kekecewaan umat islam terhadap umat Kristen karena melanggar perjanjian yang telah dibuat dalam hal izin pendirian rumah ibadah. Padahal umat islam telah memberi toleransi tetapi umat Kristen masih mendirikan rumah ibadah melebihi batas yang sudah disepakati.

Dalam hal ini, pemerintah perlu memberi kebijakan yang sesuai dan disepakati oleh masyarakat dan antara masyarakat juga perlu dilakukannya negosiasi agar kehidupan antar umat beragama di Aceh Singkil sejahtera dan jauh dari konflik yang mengatas namakan agama.

KESIMPULAN

Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu masalah yang sering mengusik kerukunan antarumat beragama adalah masalah terkait pendirian rumah ibadah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006 dan di Aceh telah diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, hal ini masih menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat.

Dari kronologi konflik di Aceh Singkil yang telah terjadi sejak tahun 1979-2015 tentang pendirian rumah ibadah, melihat hubungan antar umat beragama yang harmonis dan sesuai dengan norma-norma yang sudah disepakati didalam masyarakat dengan melihat alat analisis penahapan konflik dan urutan kejadian, konflik agama yang terjadi antar umat beragama di Aceh singkil disebabkan oleh kekecewaan umat muslim atas umat Kristen karena melanggar perjanjian yang telah disepakati

dan keputusan pemerintah tentang izin pendirian rumah ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayumi, Amindoni, 2019. "Api dalam sekam' konflik Aceh Singkil: 'Kita umat Kristen di sini merasa terombang-ambing"
(<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50471436>) diakses pada tgl 1 april 2020
- Ahmad, A, Haidlor, 20016. "Resolusi Konflik Agama Di Aceh Singkil Dalam Perspektif Budaya Dominan", Puslitbang Kehidupan Keagamaan (<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/43/29>) di akses pada tgl 31 maret 2020
- Akbar Ali, dan Zainal Abidin, 2018. "Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja" Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3, Nomor 3 : Agustus 2018 (www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP) diakses pada tgl 31 april 2020
- Al Fairusy, Muhajir, "Model Konsensus dan Rekonsiliasi Konflik Antar-umat Beragama di Aceh Singkil", Al-Ijtima'i, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015.
- Binsal, 2017. "Kerukunan Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil" Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
- Bisril, Hadi, 2017. "Problematika Pendirian Rumah Ibadah Di Aceh" Fakultas Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Juditha, Christiany, 2016. "Jurnalisme Damai Dalam Berita Konflik Agama Tolikara Di Tempo.Co" Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik, (<https://www.neliti.com/id/publications/123559/peace-journalism-in-news-tolikara-religion-conflict-in-tempoco-jurnalisme-damai>) diakses pada tgl 1 april 2020
- Kritian, Erdianto, 2016. "Tidak Ada Intoleransi di Aceh Singkil...",

<https://nasional.kompas.com/read/2016/04/23/04330051/Tidak.Ada.Intoleransi.di.Aceh.Singkil>.

diakses pada tgl 1 april 2020

M. Nur, Rochmi, 2015. “Kronologi pembakaran gereja di Aceh Singkil” (<https://beritagar.id/artikel/berita/kronologi-pembakaran-gereja-di-singkil-aceh>) diakses pada tgl 1 april 2020

Sahlan, M, 2016, “FKUB dalam Bayang-Bayang Konflik Singkil, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Simon Fisher dan Dekha I. Abdi dkk, 2000. “Mengelola Konflik Keterampilan dan strategi untuk Bertindak” The British, Jakarta.